

Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wisata: Studi tentang Kapasitas Implementasi dan Tata Kelola Kolaboratif di Desa Mekarbuana

Jeffrey Ebenezer Putra ^{1*}; Irma Jayusman ²; Ikhwani Rahmat Hidayah ³; Evi Priyanti ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

*Correspondence : 2210631180080@student.unsika.ac.id

Date of submission: 29 July 2026 | Date of acceptance: 29 August 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan Desa Mekarbuana berbasis potensi wisata dengan menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu realisme perencanaan, kapasitas implementasi, dan kepemimpinan dalam pengelolaan pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, aparat desa, dan masyarakat, serta didukung oleh observasi langsung dan dokumentasi di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata desa bertumpu pada integrasi potensi alam, pertanian, dan perkebunan melalui orientasi agrowisata. Proses perencanaan telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa, tetapi belum didukung oleh pemetaan potensi wisata yang sistematis sehingga perencanaan masih bersifat pragmatis dan berbasis pengalaman lapangan. Implementasi pembangunan menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, serta kewenangan pemerintah desa terhadap destinasi yang sebagian dikelola Perhutani dan pihak privat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa menjalankan peran sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak pemberdayaan masyarakat. BUMDes juga berperan sebagai perantara kelembagaan melalui kerja sama pengelolaan wisata yang membuka peluang peningkatan pendapatan desa.

ABSTRACT

This study aims to examine the optimization of village development planning based on tourism potential in Mekarbuana Village, with particular emphasis on three dimensions: realistic planning, implementation capacity, and leadership in development management. The study employed a qualitative approach using purposive sampling. Data were collected through interviews with the village head, a village official, and a local resident, complemented by direct observation and documentation in Mekarbuana Village, Tegalwaru District, Karawang Regency, Indonesia. The findings show that village tourism development is grounded in the integration of natural, agricultural, and plantation resources through an agritourism-oriented development vision. Although community participation has been incorporated into village planning through deliberative mechanisms, tourism planning has not yet been supported by systematic tourism potential mapping, resulting in a largely pragmatic and experience-based planning process. Development implementation is constrained by limited financial resources, human resource capacity, infrastructure, accessibility, and the limited authority of the village government over tourism sites managed by Perhutani and private actors. These conditions have encouraged the village government to assume the roles of facilitator, coordinator, and community capacity builder rather than acting solely as a direct destination manager. The Village-Owned Enterprise (BUMDes) also functions as an institutional intermediary through collaborative tourism management arrangements that create opportunities to strengthen village revenue.

Kata Kunci

Perencanaan pembangunan desa, desa wisata, agrowisata, pariwisata berbasis masyarakat.

Keywords

Village development planning, tourism village, agritourism, community based tourism.

Pendahuluan

Pembangunan perdesaan mengalami pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar menuju pendekatan yang semakin menekankan pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks tersebut, pariwisata menjadi salah satu sektor yang semakin penting karena mampu menghubungkan sumber daya alam, budaya, aktivitas ekonomi lokal, dan karakter sosial masyarakat ke dalam proses pembangunan desa. Literatur mengenai pariwisata perdesaan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dapat memperluas basis ekonomi desa, menciptakan kesempatan kerja, mendorong diversifikasi mata pencaharian, dan meningkatkan nilai ekonomi sumber daya lokal apabila direncanakan sesuai dengan kapasitas wilayah dan kebutuhan masyarakat (Streimikiene & Bilan, 2015). Oleh karena itu, evaluasi terhadap potensi desa merupakan bagian mendasar dalam menentukan arah pembangunan karena memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengidentifikasi aset, keterbatasan, serta prioritas intervensi yang sesuai dengan karakteristik lokal (Zhang, He, & Dong, 2024). Bahkan, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa perencanaan desa dapat menghasilkan dampak yang melampaui batas administratif melalui keterhubungan spasial antardesa dan antar-sumber daya pariwisata, sehingga kualitas perencanaan lokal menjadi semakin penting bagi pembangunan pariwisata perdesaan secara lebih luas (Yang et al., 2026).

Dalam perspektif pembangunan berbasis potensi wisata, keberadaan daya tarik alam atau budaya tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan pengembangan destinasi. Potensi lokal harus ditransformasikan melalui perencanaan yang memungkinkan masyarakat berperan sebagai aktor pembangunan, bukan hanya sebagai penerima dampak aktivitas wisata. Pendekatan *community-based tourism* (CBT) berkembang dari gagasan bahwa proses perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat pariwisata perlu menempatkan masyarakat lokal pada posisi sentral. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kontrol masyarakat terhadap sumber daya, memperluas partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial tidak hanya terkonsentrasi pada aktor tertentu. Kurniawan dan Cahyono (2020) menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis potensi lokal merupakan elemen penting dalam pengembangan desa wisata karena kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mengelola sumber dayanya berpengaruh terhadap keberlanjutan aktivitas wisata. Hal serupa dikemukakan Arintoko, Ahmad, Gunawan, dan Supadi (2020), yang menunjukkan bahwa strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat perlu disusun berdasarkan kombinasi kekuatan lokal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman yang dihadapi destinasi.

Partisipasi masyarakat menjadi penting bukan hanya pada tahap pelaksanaan program, tetapi sejak proses identifikasi masalah dan penyusunan rencana pembangunan. Pendekatan berbasis komunitas menempatkan masyarakat sebagai sumber pengetahuan lokal sekaligus pemilik kepentingan terhadap arah perubahan sosial dan ekonomi desa. Sulistyani et al. (2020) menekankan pentingnya pendekatan yang digerakkan oleh komunitas dalam pembangunan destinasi perdesaan, sedangkan Sugihariyanto, Suman, dan Muljaningsih (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata memiliki keterkaitan dengan penciptaan peluang ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dengan demikian, konsep “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat” tidak semata-mata merupakan prinsip normatif, tetapi menjadi prasyarat penting agar pariwisata dapat terintegrasi dengan agenda pembangunan desa dan menghasilkan manfaat yang lebih inklusif.

Namun demikian, partisipasi masyarakat memerlukan dukungan tata kelola kelembagaan yang memadai. Pengembangan desa wisata melibatkan beragam aktor dengan kepentingan, kewenangan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda. Karena itu, prinsip *good village governance* menjadi bagian penting dalam menjelaskan kualitas pengelolaan pembangunan berbasis wisata. Demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan dalam distribusi manfaat merupakan elemen yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat serta legitimasi program pembangunan (Revida & Ismail, 2025). Zaitul, Novianti, dan Ilona (2022) juga memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis desa membutuhkan sejumlah prasyarat yang tidak terbatas pada keberadaan atraksi, tetapi mencakup kesiapan masyarakat, infrastruktur, budaya lokal, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa memiliki fungsi strategis sebagai fasilitator, koordinator, regulator, dan penggerak kolaborasi dalam pengembangan destinasi (Kusworo, 2023). Kualitas kepemimpinan lokal juga penting karena pemimpin masyarakat dapat membangun visi bersama, memobilisasi sumber daya, menghubungkan kepentingan berbagai aktor, dan mempertahankan komitmen masyarakat terhadap pembangunan wisata dalam jangka panjang (Xu, Zhang, & Tian, 2017).

Selain aspek partisipasi dan tata kelola, perencanaan pembangunan desa berbasis wisata juga dituntut untuk memenuhi prinsip keberlanjutan. Pengembangan pariwisata yang hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan dan penerimaan ekonomi berpotensi menghasilkan tekanan terhadap lingkungan, perubahan sosial, konflik pemanfaatan sumber daya, dan komodifikasi budaya lokal. Oleh sebab itu, perencanaan wisata perdesaan perlu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara simultan. Muazir, Lestari, Nurhamsyah, dan Alhamdani (2023) menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan persepsi pengguna dalam pengembangan destinasi wisata, sementara Harini et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi nilai budaya lokal

dan prinsip keberlanjutan dapat memperkuat karakter serta daya tahan destinasi berbasis komunitas. Pada saat yang sama, Wijijayanti et al. (2023) mengingatkan bahwa pariwisata perdesaan tidak selalu secara otomatis menghasilkan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat tuan rumah; keberhasilannya bergantung pada bagaimana manfaat, biaya, partisipasi, dan dampak lingkungan dikelola melalui proses perencanaan dan kelembagaan yang tepat.

Perencanaan pembangunan wisata karena itu harus bersifat strategis, bertahap, dan adaptif. Perencanaan strategis memungkinkan desa menetapkan prioritas berdasarkan kapasitas aktual, membedakan agenda jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mengintegrasikan sektor pariwisata dengan pertanian, usaha mikro, ekonomi kreatif, infrastruktur, dan agenda pembangunan sosial lainnya. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mendukung proses tersebut adalah analisis SWOT karena memungkinkan pengambil kebijakan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi arah pengembangan destinasi. Raharti, Putri, Kurniawan, dan Septiani (2024) menunjukkan relevansi SWOT dalam penyusunan strategi pariwisata berkelanjutan, sementara Arintoko et al. (2020) memperlihatkan bagaimana kombinasi kekuatan dan peluang lokal dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Namun, instrumen strategis seperti SWOT hanya memiliki manfaat apabila ditopang oleh data yang memadai, partisipasi pemangku kepentingan, serta kemampuan pemerintah desa menerjemahkan hasil analisis ke dalam prioritas program yang realistis.

Transformasi ekonomi perdesaan juga menyebabkan perencanaan wisata semakin terhubung dengan sektor agribisnis, ekonomi kreatif, dan teknologi digital. Pengembangan desa wisata berbasis agribisnis memungkinkan aktivitas pertanian tidak hanya diposisikan sebagai sektor produksi, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman wisata, pendidikan, pemasaran produk lokal, dan penguatan rantai nilai ekonomi desa (Wildani Pingkan et al., 2023). Di sisi lain, ekonomi kreatif dapat memperbesar efek pengganda pariwisata dengan menghubungkan destinasi terhadap produk lokal, kuliner, kerajinan, seni, dan aktivitas kewirausahaan masyarakat (Oktavilia et al., 2024). Perkembangan teknologi digital selanjutnya memperluas ruang promosi, pemasaran, penyediaan informasi, dan pengelolaan pengalaman wisata. Studi Pranita, Kesa, dan Marsdenia (2021) memperlihatkan bahwa digitalisasi dapat menjadi bagian dari transformasi menuju *smart tourism village*, terutama ketika teknologi digunakan untuk memperkuat konektivitas, visibilitas destinasi, dan kapasitas masyarakat. Namun, adopsi teknologi tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia agar digitalisasi tidak justru memperlebar kesenjangan kapasitas antaraktor.

Perkembangan kajian desa wisata memperlihatkan bahwa penelitian sebelumnya telah menghasilkan pengetahuan yang cukup luas mengenai pemberdayaan masyarakat, CBT, kepemimpinan komunitas, tata kelola,

keberlanjutan, analisis potensi, strategi SWOT, ekonomi kreatif, serta digitalisasi destinasi. Pemetaan intelektual mengenai penelitian desa wisata juga menunjukkan bahwa partisipasi komunitas, keberlanjutan, daya saing destinasi, dan penguatan ekonomi lokal merupakan tema-tema yang semakin dominan dalam kajian kontemporer (Wahyoedi, Hermawan, Wijaya, & Setyowati, 2024). Meskipun demikian, literatur yang ditelaah cenderung membahas faktor-faktor tersebut secara parsial. Studi pemberdayaan lebih banyak menekankan kapasitas dan partisipasi masyarakat, kajian tata kelola berfokus pada kualitas kelembagaan, kajian strategis menekankan identifikasi kekuatan dan peluang, sedangkan kajian keberlanjutan menyoroti keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan perlindungan sosial dan lingkungan. Relatif terbatas perhatian yang diberikan terhadap bagaimana keseluruhan faktor tersebut berinteraksi ketika pemerintah desa harus menyusun rencana pembangunan wisata di tengah keterbatasan sumber daya, terbatasnya kewenangan terhadap objek wisata, perbedaan struktur kepemilikan destinasi, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan pada kolaborasi dengan aktor eksternal.

Kesenjangan tersebut relevan untuk dikaji melalui kasus Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Desa Mekarbuana memiliki kombinasi potensi alam dan agraris berupa kawasan pegunungan, air terjun, jalur wisata alam, perkebunan, serta komoditas lokal seperti kopi dan durian yang membuka peluang pengembangan ekowisata dan agrowisata. Orientasi pembangunan desa juga telah menempatkan pertanian dan pariwisata sebagai basis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, studi lapangan menunjukkan bahwa proses pengembangan wisata berlangsung di bawah sejumlah keterbatasan struktural. Aksesibilitas menuju beberapa destinasi masih terbatas, ketersediaan anggaran belum memadai untuk mendukung seluruh rencana pembangunan, dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata masih membutuhkan penguatan. Pemerintah desa juga tidak mengelola seluruh objek wisata secara langsung karena beberapa destinasi berada dalam kawasan yang dikelola Perhutani maupun dimiliki oleh pihak perseorangan. Kondisi tersebut membatasi intervensi langsung pemerintah desa dan menyebabkan pembangunan wisata membutuhkan koordinasi lintas aktor, pembangunan fasilitas pendukung, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Kondisi Mekarbuana menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar bagaimana mengidentifikasi potensi wisata. Pemerintah desa harus menyelaraskan antara aspirasi pembangunan dengan kapasitas fiskal, antara kebutuhan infrastruktur dengan kewenangan yang dimiliki, antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemilik atau pengelola objek wisata, serta antara kebutuhan meningkatkan jumlah kunjungan dengan tuntutan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pada saat yang sama, pemerintah desa harus memastikan bahwa masyarakat memperoleh ruang partisipasi dan manfaat ekonomi dari

perkembangan aktivitas wisata. Dengan kata lain, persoalan utama perencanaan pembangunan desa wisata terletak pada kemampuan membangun kesesuaian antara potensi lokal, kapasitas implementasi, konfigurasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan konsistensi kepemimpinan.

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pemikiran Ndraha (1982) mengenai keberhasilan pembangunan desa sebagai landasan analitis awal. Ndraha menekankan tiga prasyarat penting pembangunan desa, yaitu adanya rencana yang realistis dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana, serta adanya kepemimpinan yang konsekuen dan konsisten dalam mengelola pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kerangka tersebut memiliki relevansi dengan konteks pengembangan desa wisata karena keberhasilan pembangunan tidak cukup ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan implementasi dan kapasitas kepemimpinan dalam mempertahankan arah pembangunan. Dalam penelitian ini, tiga dimensi tersebut dikembangkan dengan memasukkan perspektif CBT, tata kelola desa, keberlanjutan, dan kolaborasi pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan wisata dipahami bukan hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai proses adaptif yang mempertemukan sumber daya, kapasitas, kewenangan, dan kepentingan berbagai aktor.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan pembangunan Desa Mekarbuana berbasis potensi wisata melalui tiga fokus utama. Pertama, penelitian menganalisis bagaimana rencana pembangunan wisata disusun secara realistis dengan mempertimbangkan potensi lokal serta kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya desa. Kedua, penelitian mengidentifikasi kendala dan peluang yang memengaruhi kesanggupan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan rencana pembangunan wisata. Ketiga, penelitian menganalisis bagaimana kepemimpinan pemerintah desa menjaga konsistensi, koordinasi, dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di tengah keterbatasan sumber daya dan konfigurasi pengelolaan destinasi yang melibatkan berbagai aktor. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara perencanaan realistis, kapasitas implementasi, dan kepemimpinan dalam pembangunan wisata berbasis komunitas. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan dasar bagi perumusan model perencanaan desa wisata yang lebih adaptif, partisipatif, kolaboratif, dan sesuai dengan kapasitas aktual desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai perencanaan pembangunan desa berbasis potensi wisata di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan pada pemahaman mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan wisata dijalankan, bagaimana pemerintah desa dan masyarakat menghadapi keterbatasan dalam implementasi pembangunan, serta bagaimana kepemimpinan lokal berperan dalam mempertahankan arah pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh informasi langsung dari aktor yang terlibat dalam proses pembangunan sekaligus memahami kondisi empiris desa melalui pengamatan lapangan dan dokumentasi.

Fokus penelitian disusun berdasarkan tiga dimensi utama pembangunan desa yang digunakan sebagai kerangka analitis penelitian, yaitu realisme perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kesanggupan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana, serta konsistensi kepemimpinan dalam mengawal proses pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Dalam konteks Desa Mekarbuana, ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana potensi wisata lokal diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan, bagaimana keterbatasan sumber daya dan kewenangan memengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana pemerintah desa membangun koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata.

Penelitian dilaksanakan di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi berkaitan dengan karakter Desa Mekarbuana yang memiliki potensi pengembangan wisata berbasis alam dan pertanian. Wilayah desa berada di kawasan pegunungan Sanggabuana dan memiliki sejumlah daya tarik wisata, termasuk air terjun, kawasan pegunungan, serta potensi pertanian dan perkebunan. Komoditas seperti kopi dan durian juga menjadi bagian dari sumber daya lokal yang berpotensi diintegrasikan dengan pengembangan agrowisata.

Desa Mekarbuana juga memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji perencanaan pembangunan wisata karena pengembangan destinasi berlangsung dalam konfigurasi pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor. Beberapa objek wisata tidak berada sepenuhnya di bawah pengelolaan langsung pemerintah desa, tetapi terkait dengan Perhutani maupun kepemilikan perseorangan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa tidak hanya berhadapan dengan persoalan pemanfaatan potensi wisata, tetapi juga dengan keterbatasan anggaran, aksesibilitas, kapasitas sumber daya manusia, kewenangan pengelolaan destinasi, dan kebutuhan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Rangkaian penelitian dilaksanakan pada periode 14–28 Maret 2025 dan dilanjutkan dengan kegiatan lapangan pada 30 April 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara daring dan tatap muka, observasi langsung, serta dokumentasi. Penggunaan lebih dari satu sumber data dimaksudkan

untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi pembangunan wisata dari perspektif aktor pemerintahan desa, masyarakat, dan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan dengan memilih individu yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan isu perencanaan dan pembangunan wisata Desa Mekarbuana. Pemilihan informan tidak diarahkan untuk memperoleh representasi statistik dari populasi desa, tetapi untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam dari aktor yang memiliki posisi berbeda dalam proses pembangunan.

Penelitian melibatkan tiga informan utama yang mewakili perspektif pemerintah desa dan masyarakat. Informan pertama adalah Kepala Desa Mekarbuana. Posisi kepala desa penting karena berkaitan langsung dengan penyusunan kebijakan, arah pembangunan, pengelolaan sumber daya desa, hubungan dengan pemerintah daerah, keterlibatan BUMDes, serta koordinasi pengembangan pariwisata. Wawancara dengan Kepala Desa dilakukan pada 20 Maret 2025 melalui Google Meet dan dilanjutkan melalui wawancara langsung pada 30 April 2025.

Informan berikutnya adalah (I), aparat Desa Mekarbuana, yang dipilih untuk memperoleh perspektif dari unsur perangkat pemerintahan mengenai pelaksanaan perencanaan dan pembangunan wisata pada tingkat desa. Wawancara dengan aparat desa dilakukan secara langsung pada 30 April 2025. Informan masyarakat adalah (WA) warga Desa Mekarbuana, yang diwawancarai pada 20 Maret 2025 melalui Google Meet. Keterlibatan informan dari masyarakat dimaksudkan untuk memberikan perspektif mengenai potensi wisata desa, kondisi lingkungan, keterlibatan masyarakat, serta pengalaman masyarakat terhadap proses pembangunan wisata. Dengan komposisi tersebut, data penelitian mencakup perspektif dari aktor pengambil keputusan, pelaksana pemerintahan, dan masyarakat lokal.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen serta literatur yang relevan dengan pembangunan desa dan pengembangan wisata. Kombinasi tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan sekaligus konteks sosial dan kelembagaan yang melatarbelakangi pengembangan wisata Desa Mekarbuana.

Wawancara merupakan sumber utama data primer. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang dikembangkan sesuai dengan fokus penelitian. Pertanyaan kepada informan pemerintah desa mencakup proses penyusunan perencanaan wisata, keberadaan pemetaan potensi, tantangan dalam perencanaan, keterlibatan masyarakat, kesiapan pemerintah desa, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, keberlanjutan program, dukungan eksternal, peran kepala

desa dan perangkat desa, serta mekanisme evaluasi pembangunan. Sementara itu, wawancara dengan masyarakat diarahkan pada identifikasi potensi wisata, kondisi alam dan lingkungan, persepsi terhadap pengembangan desa wisata, keterlibatan masyarakat, serta kondisi pembangunan yang dirasakan pada tingkat lokal.

Wawancara dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap awal, wawancara dengan Kepala Desa Mekarbuana dan informan masyarakat dilakukan melalui Google Meet pada 20 Maret 2025. Pengumpulan data kemudian dilanjutkan melalui wawancara langsung di Desa Mekarbuana pada 30 April 2025, termasuk wawancara lanjutan dengan Kepala Desa serta wawancara dengan aparat desa. Penggunaan wawancara daring dan tatap muka memungkinkan peneliti memperoleh informasi pada lebih dari satu tahap pengumpulan data sekaligus memperdalam beberapa persoalan yang berkaitan dengan kondisi aktual pembangunan wisata.

Observasi langsung dilakukan pada 30 April 2025 di Desa Mekarbuana. Peneliti hadir secara langsung di lokasi untuk mengamati kondisi sosial masyarakat, aktivitas yang berlangsung di desa, kondisi lingkungan, serta dinamika pemerintahan desa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi juga disertai dengan interaksi bersama masyarakat setempat. Melalui observasi, penelitian memperoleh informasi kontekstual yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh melalui wawancara, terutama mengenai karakter wilayah, aksesibilitas, kondisi pembangunan, dan lingkungan tempat aktivitas wisata berkembang.

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung dengan mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan lokasi dan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi arsip dan laporan yang bersumber dari instansi terkait serta literatur berupa buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan pembangunan desa dan pengembangan pariwisata. Dokumentasi juga mencakup foto yang diperoleh selama kegiatan lapangan. Data dokumenter digunakan untuk membantu memahami konteks kelembagaan dan pembangunan Desa Mekarbuana sekaligus melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang menggunakan pendekatan interaktif dan siklikal yang terdiri dari tiga tahapan utama: kondensasi data (*data condensation*) untuk memilih, menyederhanakan, dan mengodekan data mentah menjadi informasi yang fokus; penyajian data (*data display*) untuk mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk teks naratif, matriks, atau bagan agar polanya mudah dipahami; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) untuk merumuskan makna hasil penelitian secara bertahap yang terus diuji validitasnya sepanjang proses pengumpulan data berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan Pembangunan Wisata yang Realistis dan Adap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan wisata Desa Mekarbuana bertumpu pada upaya mengintegrasikan sektor pertanian dan pariwisata sebagai dua sumber daya utama desa. Orientasi tersebut tidak hanya menempatkan pariwisata sebagai sektor ekonomi baru, tetapi berupaya mempertahankan karakter agraris desa dan keberlanjutan sumber daya alam. Kepala Desa menjelaskan arah pembangunan tersebut sebagai berikut:

"Dari awal saya mempunyai judul pembangunan Desa Mekarbuana ini sebagai desa agrowisata, memadukan agro dan wisata tanpa mengganggu lingkungan sekitar.... sumber mata air kita tetap terjaga... dan masyarakat juga harus sejahtera." (wawancara 20 Maret dan 30 April 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan tiga orientasi yang berjalan secara bersamaan, yaitu pemanfaatan potensi pertanian, pengembangan aktivitas pariwisata, dan perlindungan lingkungan. Bagi pemerintah desa, agrowisata tidak dimaksudkan untuk menggantikan struktur ekonomi pertanian, melainkan menghubungkannya dengan aktivitas wisata sehingga manfaat ekonomi baru dapat terbentuk tanpa menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Perspektif pemerintah desa tersebut juga dikonfirmasi oleh aparat desa:

"Desa kita ini mau dibikin jadi desa agrowisata, nyatuin antara pertanian sama wisata. Lingkungan tetap dijaga, sumber air nggak diganggu. Yang penting warga bisa ikut nikmatin hasilnya." (Aparat Desa Mekarbuana, wawancara 30 April 2025)

Temuan tersebut sejalan dengan Kurniawan dan Cahyono (2020), yang menekankan bahwa pemberdayaan berbasis potensi lokal merupakan elemen mendasar dalam pembangunan desa wisata. Integrasi sumber daya pertanian dengan pariwisata juga memiliki kesesuaian dengan temuan Wildani Pingkan et al. (2023) mengenai pentingnya pengembangan desa wisata berbasis agribisnis. Dalam kasus Mekarbuana, pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa sumber daya lokal tidak hanya diposisikan sebagai aset wisata, tetapi sebagai dasar untuk membangun hubungan antara pariwisata, penghidupan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Potensi tersebut juga muncul dari perspektif masyarakat. Warga mengidentifikasi kombinasi antara bentang alam, air terjun, kawasan pegunungan, serta komoditas pertanian dan perkebunan sebagai kekuatan utama desa:

"Untuk desa yang berpotensi tentunya wisata alam yang sungguh melimpah ruah di Mekarbuana... salah satunya yaitu Curug... terus juga banyak hasil pertanian dan perkebunan melimpah... salah satunya yaitu durian." (Warga Desa Mekarbuana, wawancara 20 Maret 2025)

Kesesuaian persepsi antara pemerintah desa, aparat desa, dan masyarakat menunjukkan adanya pengakuan bersama bahwa potensi wisata Mekarbuana tidak hanya berada pada atraksi alam, tetapi juga pada keterhubungannya dengan aktivitas pertanian. Kesamaan persepsi ini merupakan modal sosial penting dalam perencanaan berbasis komunitas karena pengembangan pariwisata memperoleh legitimasi dari potensi yang dikenali oleh aktor pemerintah maupun masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa identifikasi potensi tersebut belum ditopang oleh pemetaan wisata yang sistematis. Aparat desa menyatakan:

"Belum ada penelitian khusus sih, kita masih jalanin sebisanya. Lihat langsung di lapangan mana yang butuh dikerjain duluan. Pokoknya yang penting bermanfaat buat warga."(wawancara 30 April 2025)

Kepala Desa juga mengakui bahwa belum terdapat kajian khusus dan keputusan pembangunan lebih banyak didasarkan pada kondisi yang secara langsung ditemukan di lapangan. Temuan ini menunjukkan karakter *pragmatic and experience-based planning* dalam pembangunan wisata Mekarbuana. Penentuan prioritas lebih banyak dilakukan berdasarkan urgensi, pengalaman lokal, dan kapasitas aktual desa daripada menggunakan pemetaan potensi, analisis kelayakan, atau basis data destinasi yang terstruktur.

Kondisi tersebut memperlihatkan dua sisi realisme perencanaan. Di satu sisi, pemerintah desa mampu menyesuaikan program dengan kemampuan aktual dan kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ndraha (1982) bahwa keberhasilan pembangunan desa membutuhkan rencana yang realistis dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Di sisi lain, ketergantungan pada pengalaman praktis tanpa pemetaan sistematis berpotensi membatasi kemampuan desa untuk menetapkan prioritas jangka panjang, mengukur kelayakan investasi, serta mengantisipasi perubahan permintaan dan risiko destinasi.

Temuan ini sekaligus menunjukkan perlunya pengembangan dari *experience-based planning* menuju *participatory evidence-based planning*. Analisis SWOT, misalnya, dapat membantu desa mengorganisasikan pengetahuan lokal menjadi informasi strategis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Arintoko et al., 2020; Raharti et al., 2024; Revida et al., 2023). Mekarbuana sebenarnya telah mengenali berbagai komponen tersebut secara informal, tetapi belum mengonsolidasikannya menjadi basis perencanaan yang sistematis.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Meskipun pemetaan potensi secara formal masih terbatas, aspek partisipatif dalam proses perencanaan menunjukkan mekanisme yang relatif jelas. Pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah dari tingkat dusun sampai tingkat desa serta dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Aparat desa menjelaskan:

"Setiap rencana pasti kita ajak warga buat musyawarah. Dari tingkat dusun sampai desa, semua dilibatkan. Biar pembangunan tidak sepihak, semua tahu dan setuju."(wawancara 30 April 2025)

Kepala Desa juga menjelaskan bahwa keterlibatan tersebut berlangsung melalui Musyawarah Dusun, penyusunan RPJMDes, RKPDDes, hingga proses yang berhubungan dengan APBDes. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat telah terinstitusionalisasi dalam mekanisme formal pemerintahan desa dan tidak hanya berlangsung pada tahap pelaksanaan program.

Temuan tersebut mendukung perspektif *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan, bukan semata-mata penerima manfaat (Arintoko et al., 2020; Sulistyani et al., 2020). Partisipasi pada tahap perencanaan juga penting untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi memiliki relevansi sosial dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Sugihariyanto et al. (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat menjadi salah satu mekanisme yang menghubungkan pembangunan pariwisata dengan peningkatan ekonomi lokal.

Namun, hasil penelitian memperlihatkan adanya ketegangan antara formal participatory planning dan limited evidence-based planning. Forum musyawarah telah tersedia, tetapi informasi teknis mengenai potensi, daya dukung, kepemilikan aset, kapasitas destinasi, dan kelayakan investasi belum disusun secara sistematis. Dengan demikian, kehadiran partisipasi prosedural belum dengan sendirinya menjamin kualitas substantif perencanaan. Partisipasi akan lebih bermakna apabila pengetahuan masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam data, prioritas program, pembagian peran, indikator keberhasilan, dan tahapan implementasi yang jelas.

3. Kapasitas Implementasi

Temuan kedua menunjukkan adanya kesenjangan antara orientasi pembangunan wisata yang relatif kuat dengan kapasitas pemerintah desa untuk merealisasikan seluruh agenda yang telah direncanakan. Pemerintah desa menunjukkan komitmen terhadap pengembangan pariwisata, tetapi secara terbuka mengakui keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Kepala Desa menyatakan:

"Kami sangat minim dengan semua sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lainnya.... [Kami membutuhkan] peningkatan sumber daya manusia supaya semuanya paham wisata itu seperti apa." (wawancara 20 Maret dan 30 April 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan politik atau komitmen pemerintah tidak selalu identik dengan kesiapan implementasi. Pemerintah desa dapat memiliki visi dan kemauan untuk mengembangkan pariwisata, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kompetensi pengelola, kemampuan fiskal, infrastruktur, serta dukungan lembaga eksternal.

Keterbatasan tersebut terlihat lebih jelas dalam rencana integrasi sejumlah objek wisata, terutama Curug Bandung dan Curug Cigentis. Kepala Desa menjelaskan:

"Kalau untuk dari dana, jujur justru itu yang jadi masalah kita.... [Ada] rencana untuk mengintegrasikan semua wisata... salah satunya menghubungkan antara Curug Bandung dengan Curug Cigentis.... karena kita tidak punya anggaran... sampai hari ini belum terealisasi." (wawancara 20 Maret dan 30 April 2025)

Aparat desa mengonfirmasi persoalan yang sama:

"Kendalanya ya di anggaran, rencana nyatuin dua curug belum jalan. Biayanya lumayan besar, desa belum sanggup sendiri. Makanya kami harap ada bantuan dari pemda." (wawancara 30 April 2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *implementation gap* tidak disebabkan oleh ketiadaan rencana, tetapi oleh ketidaksesuaian antara skala rencana dan kapasitas sumber daya. Dalam perspektif Ndraha (1982), kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi “kesanggupan melaksanakan kegiatan pembangunan”. Namun, data Mekarbuana menunjukkan bahwa kesanggupan tersebut perlu dipahami secara multidimensional, meliputi kapasitas fiskal, kapasitas SDM, kapasitas infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan kewenangan pengelolaan.

Persoalan aksesibilitas semakin memperkuat kesenjangan implementasi tersebut. Kondisi geografis pegunungan menyebabkan beberapa jalur wisata sempit dan sulit diperlebar. Rencana pemerintah desa untuk menghubungkan beberapa curug tidak hanya ditujukan meningkatkan akses wisatawan, tetapi juga membentuk rantai ekonomi lokal. Kepala Desa menjelaskan bahwa integrasi tersebut diarahkan pada pembangunan area parkir, outlet UMKM, pemasaran produk pertanian lokal, serta penyediaan angkutan desa agar dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa perencanaan infrastruktur tidak semata-mata memiliki fungsi mobilitas, tetapi berpotensi menjadi instrumen distribusi manfaat ekonomi pariwisata kepada masyarakat.

Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur merupakan persoalan strategis karena menentukan kemampuan desa mengonversi potensi wisata menjadi aktivitas ekonomi. Temuan tersebut mendukung Zaitul et al. (2022), yang menempatkan aksesibilitas dan infrastruktur sebagai bagian dari kriteria penting pembangunan desa wisata.

4. Fragmentasi Kepemilikan Destinasi dan Tata Kelola Kolaboratif

Temuan penting lainnya adalah bahwa pemerintah Desa Mekarbuana tidak menguasai secara langsung sebagian besar objek wisata yang berkembang di wilayahnya. Sejumlah destinasi berada di bawah kepemilikan pribadi atau berkaitan dengan Perhutani. Aparat desa menggambarkan kondisi tersebut secara lugas:

“Objek wisatanya kebanyakan milik pribadi atau Perhutani, jadi desa nggak bisa ngatur langsung. Kita fokusnya bantu warga biar bisa ikut usaha di sana. Jalan dan fasilitas juga pelan-pelan kita bantuin.” *wawancara 30 April 2025*)

Temuan ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa pengembangan desa wisata tidak selalu berlangsung dalam situasi ketika pemerintah desa memiliki kontrol penuh terhadap destinasi. Fragmentasi kepemilikan menciptakan keterbatasan kewenangan pemerintah desa untuk melakukan intervensi langsung pada objek wisata. Akibatnya, peran pemerintah bergeser dari *direct destination manager* menuju *facilitator*, *coordinator*, *capacity builder*, dan *institutional broker*.

Kondisi tersebut memperluas pemahaman mengenai *good village governance*. Pemerintah desa tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif internal, tetapi juga kemampuan mengelola hubungan dengan pemilik aset, Perhutani, BUMDes, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku ekonomi lainnya. Kusworo (2023) menekankan fungsi pemerintah dalam akselerasi pembangunan desa wisata,

sementara Revida dan Ismail (2025) menunjukkan pentingnya partisipasi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola desa wisata. Kasus Mekarbuana menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut menjadi semakin penting ketika *ownership* dan *authority* tersebar di antara berbagai aktor.

Dalam menghadapi keterbatasan kepemilikan aset, BUMDes muncul sebagai salah satu mekanisme kelembagaan yang memungkinkan desa memperoleh manfaat dari aktivitas wisata. Kepala Desa menjelaskan:

"Kita dari BUMDes mulai 2024... sudah melakukan kerja sama dengan pihak Perhutani... untuk ikut pengelolaan Curug Cigentis.... kita membuat fasilitas untuk selfie dan kolam renang... dari situ kita dapat sharing fee, sehingga ada pemasukan buat BUMDes dan ada buat pendapatan asli desa." (wawancara 20 Maret dan 30 April 2025)

Keterangan tersebut dikonfirmasi oleh aparat desa:

"Kita udah kerja sama dengan Perhutani lewat BUMDes buat ngelola Curug Cigentis. Bangun kolam renang sama tempat selfie biar ada pemasukan. Sebagian untungnya masuk ke desa." (wawancara 30 April 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa BUMDes dapat memainkan fungsi lebih luas daripada sekadar unit usaha desa. Dalam kasus Mekarbuana, BUMDes berfungsi sebagai *institutional intermediary* yang mempertemukan kepentingan pemerintah desa, pengelola kawasan, destinasi, dan kepentingan ekonomi masyarakat. Melalui kerja sama kelembagaan, desa memperoleh akses terhadap rantai nilai ekonomi wisata meskipun tidak memiliki keseluruhan aset destinasi.

Hal tersebut memperkaya perspektif CBT. Literatur CBT menekankan pentingnya kepemilikan lokal, partisipasi, dan distribusi manfaat ekonomi (Arintoko et al., 2020; Kurniawan & Cahyono, 2020; Giampiccoli & Saayman, 2018). Temuan Mekarbuana menunjukkan bahwa manfaat lokal tidak harus selalu bergantung pada kepemilikan aset langsung, tetapi dapat diperoleh melalui akses institusi dan pengaturan kolaborasi. Dengan demikian, penguatan kelembagaan lokal menjadi faktor penting agar masyarakat tetap dapat memperoleh manfaat dari pariwisata dalam struktur kepemilikan destinasi yang terfragmentasi.

5. Kepemimpinan, Pembinaan, dan Adaptasi terhadap Permasalahan Lapangan

Kepemimpinan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam menghubungkan perencanaan dengan implementasi. Selain merumuskan visi agrowisata, pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas wisata, termasuk penguatan Sapta Pesona, kebersihan, keamanan, pelayanan, dan transportasi lokal.

Salah satu contoh adaptasi tersebut terlihat pada pengelolaan ojek di kawasan Curug Cigentis. Pada periode ramai pengunjung, keterbatasan jalan menyebabkan kendaraan tidak dapat sepenuhnya mencapai lokasi. Pemerintah desa kemudian melakukan pembinaan terhadap pengemudi ojek lokal. Kepala Desa menjelaskan:

"Di waktu-waktu hari rame tidak bisa masuk mobil ke lokasi.... kami pembinaan juga terhadap masyarakat melalui ojek. Ojek ini kita bina, ada asosiasinya dengan tarif harga yang sama.... kita

juga mengarahkan untuk mereka lebih berpakaian sopan [dan] sopan santunnya betul-betul dilaksanakan.”(wawancara 20 Maret dan 30 April 2025)

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masalah infrastruktur menghasilkan respons kelembagaan dan peluang ekonomi baru. Ketidakmampuan kendaraan besar mencapai destinasi merupakan kendala aksesibilitas, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang ekonomi bagi jasa transportasi masyarakat. Pemerintah desa kemudian berusaha mengelola ruang ekonomi tersebut melalui standardisasi tarif dan pelayanan.

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pembangunan desa wisata bersifat adaptif, bukan hanya administratif. Pemimpin desa harus mampu membaca konsekuensi dari keterbatasan pembangunan, mengorganisasikan masyarakat, serta mengubah sebagian kendala menjadi peluang keterlibatan ekonomi. Temuan ini berhubungan dengan Xu et al. (2017), yang menegaskan peran kepemimpinan lokal dalam mengarahkan dan memobilisasi komunitas pada pembangunan pariwisata perdesaan.

Namun, proses pembinaan masyarakat tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Kepala Desa mengakui:

*“Yang namanya membina masyarakat kita juga tidak semuanya sesuai dengan harapan kita.... kami butuh polesan dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun dari akademisi.”
(wawancara 20 Maret dan 30 April 2025)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan desa memiliki batas institusional. Perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan kapasitas pariwisata membutuhkan proses berkelanjutan serta dukungan pengetahuan dan sumber daya dari luar desa. Oleh karena itu, kepemimpinan yang konsisten tidak dapat dipahami sebagai kemampuan kepala desa bekerja secara independen, tetapi juga sebagai kemampuan membangun jaringan kolaborasi.

Pertumbuhan aktivitas wisata juga memunculkan persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Kepala Desa menjelaskan bahwa peningkatan jumlah pengunjung berhubungan dengan persoalan sampah, keamanan, kesehatan lingkungan, dan perbedaan tingkat kesadaran masyarakat:

“Tidak semua warga juga bisa mendukung hal tersebut.... untuk penanganan sampah dan dari sisi keamanan lingkungan dan sebagainya, karena yang namanya di wisata ini kan kompleks.... yang datang itu hampir semua membuat sampah.” (wawancara 20 Maret dan 30 April 2025)

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan wisata menghasilkan konsekuensi yang membutuhkan kapasitas pengelolaan baru. Pada tahap awal pengembangan, perhatian mungkin terkonsentrasi pada penciptaan destinasi dan peningkatan kunjungan. Namun, ketika aktivitas wisata meningkat, kebutuhan pengelolaan bergeser menuju pengendalian dampak lingkungan dan kualitas pengalaman wisatawan.

Kondisi tersebut sejalan dengan Wijijayanti et al. (2023), yang menunjukkan bahwa keberadaan pariwisata perdesaan tidak secara otomatis menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Muazir et al. (2023) juga menegaskan pentingnya

perlindungan sumber daya dalam pembangunan destinasi. Temuan Mekarbuana menunjukkan bahwa keberlanjutan perlu ditempatkan sejak tahap perencanaan, bukan baru menjadi respons setelah jumlah wisatawan meningkat.

6. Monitoring dan Evaluasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi pembangunan wisata telah tersedia, tetapi masih bertumpu pada indikator sederhana. Pemerintah desa terutama memperhatikan perkembangan jumlah pengunjung dan tingkat keterlibatan masyarakat lokal. Kepala Desa menyatakan:

“Untuk wisata-wisata yang dikelola pribadi kita hanya bisa melihat tolak ukurnya dari kemajuan wisata tersebut, dalam arti apakah pengunjungnya banyak, berkembang terus atau bagaimana.... [dan] agar yang dilibatkan untuk bekerja itu betul-betul warga masyarakat desa.” (wawancara 20 Maret dan 30 April 2025)

Aparat desa memberikan penjelasan yang konsisten:

“Kita lihat dari rame nggaknya pengunjung dan manfaat buat warga. Yang kerja di sana juga kita usahain dari warga lokal. Kalau desa yang kelola langsung, lebih gampang diawasi.” (wawancara 30 April 2025)

Kedua pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi pemerintah desa telah menggabungkan indikator pertumbuhan destinasi dan manfaat sosial ekonomi lokal. Pengunjung dipandang sebagai indikator perkembangan wisata, sedangkan keterlibatan masyarakat digunakan untuk menilai apakah aktivitas pariwisata memberikan manfaat bagi warga.

Meskipun relevan, indikator tersebut belum mencerminkan seluruh dimensi pembangunan wisata berkelanjutan. Evaluasi yang lebih komprehensif perlu mencakup kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan BUMDes, distribusi peluang usaha, kualitas pekerjaan, kondisi lingkungan, pengelolaan sampah, kualitas sumber air, kepuasan pengunjung, kapasitas destinasi, serta efektivitas kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara implementasi adaptif dan *performance-based evaluation*. Pemerintah desa telah menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap masalah lapangan, tetapi belum memiliki sistem indikator multidimensional untuk mengetahui apakah keseluruhan pembangunan bergerak menuju sasaran jangka panjang. Dalam konteks ini, penguatan sistem monitoring menjadi bagian penting dari transisi menuju perencanaan berbasis bukti.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata Desa Mekarbuana berlangsung dalam interaksi antara potensi lokal yang kuat dan kapasitas implementasi yang terbatas. Keberadaan air terjun, pegunungan, pertanian, perkebunan, serta komoditas lokal menyediakan modal pembangunan, tetapi pemanfaatannya dibatasi oleh infrastruktur, kapasitas SDM, anggaran, konfigurasi kepemilikan destinasi, dan dukungan eksternal.

Hasil penelitian mengonfirmasi Ndraha (1982) bahwa rencana realistis, kesanggupan melaksanakan pembangunan, dan kepemimpinan yang konsisten merupakan komponen penting keberhasilan pembangunan desa. Namun, temuan

Mekarbuana menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut tidak bekerja secara linear. Perencanaan dipengaruhi oleh kapasitas implementasi; kapasitas implementasi dipengaruhi oleh sumber daya dan kewenangan; sementara kepemimpinan berfungsi menghubungkan keterbatasan tersebut melalui partisipasi, pembinaan, adaptasi, dan kolaborasi.

Temuan juga memperluas perspektif *community-based tourism*. Partisipasi masyarakat di Mekarbuana tidak hanya ditemukan dalam musyawarah formal, tetapi juga dalam jasa transportasi lokal, peluang pekerjaan, aktivitas BUMDes, serta orientasi untuk memastikan manfaat wisata dinikmati masyarakat. Namun, partisipasi tersebut berlangsung dalam kondisi ketika pemerintah desa dan komunitas tidak menguasai seluruh aset destinasi. Oleh karena itu, studi ini menunjukkan pentingnya akses institusi untuk keuntungan pariwisata sebagai pelengkap konsep kepemilikan dan partisipasi dalam CBT.

Temuan yang relatif tidak terduga adalah bahwa fragmentasi kepemilikan destinasi tidak sepenuhnya menghambat keterlibatan desa. Sebaliknya, kondisi tersebut mendorong berkembangnya fungsi fasilitasi, mediasi, dan kerja sama melalui BUMDes. Pemerintah desa tidak menjadi pengelola tunggal, tetapi memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat, pengelola destinasi, Perhutani, dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Penelitian juga menemukan adanya paradoks antara partisipasi formal yang relatif berkembang dan basis informasi perencanaan yang masih terbatas. Masyarakat telah dilibatkan dari tingkat dusun hingga desa, tetapi kajian dan pemetaan potensi wisata secara formal belum tersedia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pembangunan wisata Mekarbuana tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan partisipasi semata. Mekanisme partisipatif yang telah terbentuk perlu dikombinasikan dengan pemetaan sumber daya, analisis kelayakan, inventarisasi kewenangan dan kepemilikan, indikator keberlanjutan, serta sistem monitoring yang lebih sistematis.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan berbasis potensi wisata di Desa Mekarbuana dapat dipahami sebagai proses membangun kesesuaian antara potensi lokal, kapasitas implementasi, partisipasi masyarakat, kewenangan kelembagaan, kolaborasi pemangku kepentingan, dan kepemimpinan adaptif. Perencanaan yang realistis bukan berarti membatasi ambisi pembangunan pada sumber daya yang tersedia saat ini, melainkan membangun tahapan pembangunan yang sesuai dengan kapasitas desa sekaligus memperluas kapasitas tersebut melalui pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi eksternal.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi perencanaan pembangunan Desa Mekarbuana berbasis potensi wisata ditentukan oleh kemampuan desa membangun kesesuaian antara potensi lokal, kapasitas implementasi, partisipasi

masyarakat, dan kepemimpinan yang konsisten. Potensi alam, pertanian, perkebunan, serta orientasi agrowisata memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan desa wisata, tetapi realisasinya masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan belum tersedianya pemetaan potensi wisata yang sistematis. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa menunjukkan bahwa proses perencanaan telah memiliki basis partisipatif. Temuan ini menegaskan bahwa perencanaan yang realistis tidak cukup hanya menyesuaikan program dengan kondisi lokal, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas analitis, kelembagaan, dan sumber daya agar rencana dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan pemerintah desa terhadap sejumlah objek wisata yang dikelola Perhutani maupun pihak privat tidak sepenuhnya menghambat pembangunan, tetapi mendorong munculnya pola tata kelola yang lebih kolaboratif. Pemerintah desa menjalankan fungsi sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak pemberdayaan masyarakat, sementara BUMDes menjadi perantara kelembagaan yang memungkinkan desa memperoleh manfaat ekonomi melalui kerja sama pengelolaan wisata. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata bukan hanya bergantung pada kepemilikan aset atau besarnya potensi destinasi, melainkan pada kemampuan pemerintah desa menghubungkan perencanaan realistis, kapasitas implementasi, kepemimpinan adaptif, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Temuan ini sekaligus memperkuat relevansi kerangka Ndraha mengenai rencana realistis, kesanggupan pelaksanaan, dan kepemimpinan yang konsisten, dengan menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut saling bergantung dalam praktik pembangunan desa wisata.

Referensi

- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur tourism village area, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 398–413. doi:10.30892/gtg.29202-477
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(4), 1–27.
- Harini, S., Rahmawati, R., Silaningsih, E., Nurhayati, I., Mutmainah, I., Rainanto, B. H., & Endri, E. (2025). Development of halal tourism villages based on local culture and sustainability. *Tourism and Hospitality*, 6(2), 55. doi:10.3390/tourhosp6020055

- Kurniawan, M. U., & Cahyono, A. E. (2020). The community empowerment program based on local potential through tourism village. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485, 012089. doi:10.1088/1755-1315/485/1/012089
- Kusworo. (2023). Government functions acceleration in tourist village development: A case study of Dermaji Village. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), e01296. doi:10.26668/businessreview/2023.v8i3.1296
- Muazir, S., Nurhamsyah, M., & Alhamdani, M. R. (2023). Towards the sustainable marine tourism in Temajuk Sambas: Perspective of visitors. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1218(1), 012015. doi:10.1088/1755-1315/1218/1/012015
- Ndraha, T. (1982). *Metodologi penelitian pembangunan desa*. Jakarta, Indonesia: Bina Aksara.
- Oktavilia, S., Firmansyah, Suharno, Fafurida, Rahman, Y. A., & Adzim, F. (2024). How creative economy development plays a role as a driving force in community-based tourism village development? An empirical study in Central Java Province. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 5008–5018. doi:10.62754/joe.v3i7.4609
- Pranita, D., Kesa, D. D., Marsdenia, & Arifin, A. S. (2021). Digitalization methods from scratch nature towards smart tourism village: Lessons from Tanjung Bunga Samosir, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1933(1), 012053. doi:10.1088/1742-6596/1933/1/012053
- Raharti, R., Putri, W. H., Kurniawan, A., & Septiani, A. R. A. (2024). Sustainable tourism development strategy: The SWOT analysis method. In *15th International Conference on Advances in Computing, Control, and Telecommunication Technologies (ACT 2024)* (Vol. 2, pp. 2597–2602). Grenze Scientific Society.
- Revida, E., & Ismail, R. (2025). Good village governance to enhance community welfare and the development of tourism villages. In B. Agustono & W. B. Horton (Eds.), *Cultures, societies and politics in North Sumatra–Indonesia* (pp. 113–128). New York, NY: Nova Science Publishers.
- Revida, E., Ismail, R., Lumbanraja, P., Trimurni, F., Sembiring, S. A. B., & Purba, S. (2023). Village owned enterprises governance (BUMDes) based on the tourism village development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(10), 3341–3346. doi:10.18280/ijstdp.181034
- Streimikiene, D., & Bilan, Y. (2015). Review of rural tourism development theories. *Transformations in Business & Economics*, 14(2), 21–34.
- Sugihariyanto, S., Suman, A., & Muljaningsih, S. (2019). The effort of increasing people's income through community participation-based tourism village in Gunungsari in the sub-district of Bumiaji in the city of Batu. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(1), 96–99.

- Sulistiyani, A., Firzal, Y., Yesicha, C., Safri, & Sari, G. G. (2020). Encouraging community-driven approach in developing Koto Sentajo. *Journal of Physics: Conference Series*, 1655(1), 012149. doi:10.1088/1742-6596/1655/1/012149
- Wahyoedi, S., Hermawan, B., Wijaya, A., & Setyowati, L. (2024). Exploring trends and future paths in tourism villages research: An intellectual mapping. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 599–611. doi:10.62754/joe.v3i3.3359
- Wijijayanti, T., Salleh, N. H. M., Hashim, N. A., Mohd Saukani, M. N., & Abu Bakar, N. (2023). The feasibility of rural tourism in fostering real sustainable development in host communities. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 46(1), 336–345. doi:10.30892/gtg.46137-1031
- Wildani Pingkan, S. H., Kalaba, Y., Safitri, D., Alamsyah, A., Kurnia, I., Asngadi, & Sutomo, M. (2023). Development of agribusiness-based tourism villages in Sigi Regency, Central Sulawesi, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1253(1), 012086. doi:10.1088/1755-1315/1253/1/012086
- Xu, K., Zhang, J., & Tian, F. (2017). Community leadership in rural tourism development: A tale of two ancient Chinese villages. *Sustainability*, 9(12), 2344. doi:10.3390/su9122344
- Yang, Q., Luo, D., Tan, T., Cai, Y., & Wang, M. (2026). Spatial spillover effects of village planning on rural tourism resource development: Evidence from Hainan Province. *Tropical Geography*, 46(4), 667–679. doi:10.13284/j.cnki.rddl.20250464
- Zaitul, Novianti, N., & Ilona, D. (2022). Tourism governance: Village-based tourism criteria in Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 41(2), 415–421. doi:10.30892/gtg.41211-845
- Zhang, X., He, Y., & Dong, J. (2024). Landscape pattern study based on evaluating the development potential of villages. *Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition)*, 48(3), 155–164. doi:10.12302/j.issn.1000-2006.202208046